

Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana

Prasethyo Darmawan Sumba*, Fenti Prihatini Dance Tui, Rustam Tohopi^{a, 1}

^a Universitas Negeri Gorontalo, Program Studi Sarjana Administrasi Publik, Gorontalo, Indonesia

¹ prasethyo_iap_s12017@mahasiswa.ung.ac.id; ² fentiprihatini@yahoo.co.id; ³ rustam@ung.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Key word:

Policy Implementation,
Family Planning Village
(KB)

This study aims to describe the implementation of the village family planning program policy regarding planning, implementation, monitoring and evaluation and the factors that determine the implementation of the family planning village program (KB) policy, mentality, system, networking. This study uses a qualitative approach with qualitative descriptive research, while the data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Based on the results of the study, the implementation of the family planning village program (KB) policy in Kota Barat District has generally been carried out well, but there are still obstacles such as the limited secretariat and service space, the quality of human resources for extension workers needs to be improved and office infrastructure is still lacking such as computers and Internet. Judging from the factors that determine the implementation of the village family planning (KB) program policy, in general it has not been fulfilled in accordance with the objectives of the KB village program system itself, namely the system in the Kota Barat District, the SOP and service flow are not listed on the information board, so people are still confused when take care of the service files they submit.

INTISARI

Kata kunci:

Implementasi Kebijakan,
Kampung Keluarga
Berencana (KB)

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan program kampung KB mengenai perencanaan, pelaksanaan, monev dan faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan program kampung keluarga berencana (KB), mentalitas, system, networking. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan program kampung keluarga berencana (KB) di Kecamatan Kota Barat pada umumnya telah dilakukan dengan baik, tetapi masih terdapat kendala seperti terbatasnya sekretariat dan ruang pelayanan, kualitas SDM penyuluh perlu di tingkatkan dan prasarana perkantoran yang masih kurang seperti komputer dan internet. Dilihat dari faktor-faktor yang menentukan implemetasi kebijakan program kampung keluarga berencana (KB) pada umunya belum terpenuhi sesuai dengan tujuan system program kampung KB itu sendiri yakni pada system di Kecamatan Kota Barat SOP dan alur pelayanannya tidak tertera di papan informasi jadi masyarakat masih kebingungan saat mengurus berkas pelayanan yang mereka ajukan.

Copyright © 2021 (Prasethyo Darmawan Sumba). All Right Reserved

* Korespondensi Penulis. e-mail: prasethyo_iap_s12017@mahasiswa.ung.ac.id

1. Pendahuluan

Negara berkembang selalu saja mengalami masalah utama yakni pembangunan. Dimana salah satu poin besar mengenai kualitas hidup yang rendah. Selama ini kebijakan dan program kependudukan di Indonesia menitikberatkan pada upaya untuk mengelola pertumbuhan penduduk. Upaya tersebut dilakukan melalui program Keluarga Berencana. Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekankan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya terbatas pada masalah pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera saja, akan tetapi juga masalah pengendalian penduduk [1].

Program Keluarga Berencana sebagai solusi pertumbuhan penduduk adalah langkah yang tepat, selain jumlah penduduk dapat di tekan sisi sosial dan ekonomi pun tergarap. Tak hanya menekan pertumbuhan penduduk, pembentukan kampung keluarga berencana (KB) ini juga terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan masyarakat melalui pemberdayaan potensi masyarakat di daerah tersebut untuk bisa meningkatkan standar kesehatan dan perekonomian. Dengan melambatkan pertumbuhan penduduk, niscaya akan mengurangi angka kemiskinan karena beban hidup keluarga akan semakin berkurang. Melalui Kampung KB ini diharapkan akan mampu memunculkan berbagai inovasi strategis yang dapat di jadikan sebagai sebuah icon untuk dapat mengimplementasikan berbagai program prioritas di lapangan di lapangan terutama terkait dengan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan program lintas sektoral lainnya secara utuh dan terpadu.

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan masih terdapat beberapa masalah, belum optimalnya kelompok kegiatan keluarga berencana yang menyentuh dan merubah perilaku masyarakat sehingga masyarakat belum memahami program keluarga berencana. Rendahnya kualitas SDM kelompok kegiatan kader Keluarga Berencana sehingga menurunnya kinerja kelompok, Kurangnya pendekatan yang di lakukan oleh aparaturnya sehingga kebijakan yang di implementasikan belum berpengaruh kepada masyarakat, kurangnya koordinasi dan kerja sama dengan instansi lainnya (lintas sektor) seperti dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pendidikan, juga dinas pemberdayaan dan perlindungan anak yang merupakan wilayah koordinasi lintas sektoral, Belum optimalnya evaluasi dan monitoring pada setiap kebijakan yang dijalankan sehingga kurangnya kebijakan yang strategis dan realistis yang di aplikasikan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, tertarik untuk mengkaji dan meneliti masalah tersebut dengan mengambil judul “Implementasi kebijakan program kampung keluarga berencana di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo”

2. Metode Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah pada Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo. Waktu yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 bulan sejak pengumpulan data. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan model Miles dan Huberman.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana

3.1.1 Perencanaan

Pelaksanaan perencanaan program kampung KB telah melihat kondisi eksternal hal ini dengan dilaksanakannya sosialisasi di tiap-tiap kelurahan yang ada kampung KB mengenai mekanisme kelompok kegiatan yang dilakukan baik itu dilihat dari program yang dijalankan maupun data-data kampung KB. Selanjutnya hasil pengamatan dan penelusuran peneliti dilapangan menunjukkan sosialisasi yang diberikan oleh pihak DPPKBP3A Kota Gorontalo tidak secara rutin dilaksanakan sehingga ini juga menjadi suatu kendala masyarakat tidak dapat menerima informasi secara jelas dan hal ini pula menjadikan kurangnya kesadaran masyarakat tentang program Keluarga Berencana.

3.1.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan Program Kampung KB pihak BKKBN maupun DPPKBP3A Kota Gorontalo selalu melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yaitu dengan dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial dan instansi lintas sektor lainnya. Namun hasil pengamatan dan penelusuran peneliti di lapangan menunjukkan bahwa evaluasi yang dilaksanakan oleh pihak BKKBN maupun DPPKBP3A Kota Gorontalo hanya di adakan 1(satu) kali dalam setahun, jadi evaluasi itu tidak dilaksanakan setiap 6(enam) bulan sekali, sedangkan untuk koordinasi secara vertikal memang telah dilaksanakan secara rutin 3 (tiga) bulan sekali, tetapi seharusnya pihak kecamatan melaksanakan koordinasi secara vertikal sebulan sekali demi kelancaran kegiatan pelaksanaan pelayanan. Dengan koordinasi yang dilaksanakan secara rutin akan dapat meningkatkan kualitas program kampung KB di Kota Gorontalo.

3.2.3 Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa Penyuluh KB telah melaksanakan persiapan monitoring dan evaluasi setiap bulannya, kader kelompok kegiatan memberikan laporan tiap bulannya dalam bentuk laporan tertulis kepada DPPKBP3A Kota Gorontalo. Sebuah program maupun kebijakan harusnya selalu di monitoring dan dievaluasi dengan baik untuk menjaga terselenggaranya program kampung KB yang berkualitas. Komunikasi atau kerjasama antara atasan dan penyuluh sangat penting guna pengawasan yang lebih baik dan efektif, artinya penyuluh akan turut berperan serta dalam mencapai tujuan sebuah kebijakan.

3.2 Faktor-Faktor yang menentukan Implementasi Kebijakan Program Kampung KB dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

3.2.1 Mentalitas

Pendekatan mentalitas yang merupakan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi Program Kampung KB belum maksimal dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa mentalitas aparatur pelaksana dan masyarakat perlu dan penting untuk dilakukan perbaikan. Berbicara masalah implementasi kebijakan Program Kampung KB maka tidak akan terlepas dengan proses pemberian pelayanan kepada masyarakat, untuk itu sikap implementor atau pelaksana kebijakan dalam memberikan pelayanan akan menjadi perhatian dalam pembahasan mentalitas aparatur, karena dampak yang diinginkan adalah pelayanan publik yang efektif, sehingga dalam pelaksanaan pelayanan aparatur harus memperlakukan masyarakat secara adil, dan masyarakat juga perlu menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi. Sesuai dengan hasil penelitian masih terdapat beberapa keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan KB yang dijalankan Kecamatan Kota Barat, keluhan ini menurut pernyataan informan masyarakat yang ditemui peneliti yaitu menyatakan bahwa mereka masih menunggu lama atau berjam-jam dalam menunggu pelayanan, selain itu untuk kepastian waktu pelayanan yang rutin dilaksanakan, hal inilah yang menjadikan masyarakat menunggu lama dalam ruang pelayanan. Untuk mengatasi masalah ini di butuhkan peran pimpinan untuk mengkoordinir kehadiran, kinerja para pegawainya dan memotivasi pegawainya agar lebih disiplin dalam melaksanakan tugasnya, karena dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik, peran dari pemimpin menjadi penentu, berhasil dan gagalnya suatu kebijakan mencapai dampak-dampak yang diinginkan terletak pada kualitas kepemimpinan yang dimiliki dari suatu organisasi yang disertai tugas memimpin dalam organisasi tersebut.

3.2.2 Sistem

Pendekatan sistem yang merupakan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan Kampung KB di Kecamatan Kota Barat hasilnya belum memenuhi kriteria. Hal ini dapat dilihat dari Ketersediaan sarana prasarana masih kurang dalam menunjang kegiatan program kampung KB, ketersediaan SDM juga masih kurang, sementara kedua hal ini begitu penting dalam menunjang pelaksanaan program kampung KB yang diterapkan dikecamatan sehingga perlunya perbaikan secara terus menerus dari DPPKBP3A Kota Gorontalo. Sesuai penelitian yang dilaksanakan kampung KB telah memiliki SOP tetapi belum berjalan sesuai SOP ada. Dalam pembuatan standar pelayanan sebaiknya DPPKBP3A perlu memperhatikan : 1) Standar pelayanan sebaiknya hanya mengatur hal-hal yang pokok menyangkut sistem pelayanan publik, dari sisi input dimana meliputi : a) Standar pembiayaan, b) sarana dan prasarana, c) kompetensi aparat dan kewenangannya. 2) Standar proses dimana mengatur prinsip dasar dalam mengelola pelayanan publik, standar proses ini tidak perlu dilakukan seideal mungkin sehingga mudah merespon dinamika yang berkembang dilingkungan. 3) Standar output, dalam hal ini standar perlu mendeskripsikan pelayanan yang akan diterima oleh pengguna layanan secara jelas dan baik, mencakup kualitas dan kuantitasnya.

3.2.3 Jejaring Kerja Sama

Pendekatan jejaring kerjasama yang merupakan faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan Program Kampung KB pada umumnya belum memenuhi kriteria atau belum sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pelayanan yang ada di kampung KB kecamatan Kota barat selama ini telah menjangkau kerja sama antar instansi lintas sektor terkait sesuai yang dikatakan oleh informan namun untuk kerja sama antar masyarakat masih belum sepenuhnya dilaksanakan,. Hanya awal-awal saja dilaksanakan program kerja sama dengan masyarakat namun sudah mulai tidak berjalan lagi. Sementara DPPKBP3A dapat mengembangkan pendekatan jejaring kerja sama dari level terendah dalam birokrasi maupun diluar birokrasi, seperti kerja sama diluar birokrasi Kantor kecamatan dapat melakukan kerja sama dengan para pelaku- pelaku usaha, dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan KB. Bentuk kerjasama yang dikembangkan dalam birokrasi mulai dari tingkat desa/ kelurahan, dan Instansi lintas sektor yang menjalankan program KB seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.

3.3 Pembahasan

3.3.1 Implementasi Kebijakan Kampung Keluarga Berencana di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo.

3.3.1 Perencanaan

Menurut Kadji, perencanaan adalah pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan di kerjakan di masa depan merupakan langkah-langkah yang di ambil oleh manajemen organisasi guna lebih menjamin bahwa pada organisasi tersedia rencana untuk operasional aktivitas organisasi dalam satu tahun [2]. Bryson mengemukakan perencanaan strategis bagi organisasi nonprovit dalam hal ini pemerintah daerah, yang dijabarkan mengenai langkah-langkah diantaranya: 1) Memakrasai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis, 2) Identifikasi mandat organisasi, 3) memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi, 4) Penilaian terhadap lingkungan eksternal, 5) Penilaian terhadap lingkungan internal, 6) Identifikasi isu-isu strategis yang di hadapi organisasi, 7) Merumuskan strategi untuk mengelola isu strategis, 8) penetapan visi organisasi yang efektif dan efisien. Langkah-langkah ini harus sesuai dengan arah implementasi, *output* dan proses evaluasi [3]. Pelaksanaan perencanaan implementasi kebijakan Program Kampung KB di Kecamatan Kota Barat, pada umumnya masih butuh pembenahan dengan perlu melakukan perbaikan pada perencanaan program dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal dan eksternal Kantor Kecamatan, peningkatan sumber daya aparatur, dukungan anggaran, pengorientasian anggaran, serta kesejahteraan penyuluh. Perencanaan harus mendapat perhatian lebih besar karena belum dapat direncanakan sebaik mungkin adalah peningkatan sumber daya penyuluh. Kantor kecamatan saat ini masih dalam tahap pembenahan baik organisasi ataupun dari segi administrasinya, dalam proses pembenahan koordinasi dengan instansi serta lembaga-lembaga terkait sangat diperlukan. Memperhatikan dinamika lingkungan eksternal dan internal serta kecenderungan yang terjadi beberapa tahun terakhir, maka kedepan diperkirakan terdapat 2 (dua) tema penting yang akan tetap menjadi isu sentral dan perhatian dari berbagai pihak yang juga akan berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan kampung KB di Kecamatan Kota Barat.

3.3.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah tindakan merealisasikan perencanaan penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum pada organisasi dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen teknis pelaksanaan, sehingga secara otomatis dapat diefektifkan [2]. Menurut Elwan Pelaksanaan merupakan aktifitas-aktifitas [4]. Pelaksanaan ini sangat penting karena berhubungan dengan manusia sebagai objek langsungnya. Pelaksanaan berarti membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Pelaksanaan pelayanan program Kampung KB Kecamatan Kota Barat, pada umumnya belum memenuhi kriteria dan

dapat dikatakan masih belum dilaksanakan dengan baik, hal ini diperkuat dengan hasil penelitian dan wawancara dilapangan menyatakan bahwa pelaksanaan program sangat perlu dan penting untuk melakukan perbaikan, namun untuk alur pelaksanaan pelayanan KB itu sendiri menurut informan masyarakat masih kurang dipahami, ada masyarakat yang mengatakan bahwa pelayanan KB belum dilaksanakan secara terstruktur sehingga mereka kebingungan namun ada juga masyarakat yang dapat paham mengenai standar pelayanan yang telah dibuat. Koordinasi dalam pelayanan program kampung KB di kecamatan menjadi sangat dibutuhkan, berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa dalam tataran koordinasi dapat dikatakan belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat pada saat proses pengurusan rekomendasi baik itu pelayanan maupun program yang dilaksanakan. Masih banyaknya warga masyarakat yang sering mengeluhkan program yang dijalankan tidak sesuai yang di harapkan.

3.3.3 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah pemeriksaan terhadap penyimpangan, kesalahan atau kekeliruan bahkan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan [2]. Sedangkan evaluasi adalah penilaian terhadap langkah-langkah menuju perbaikan terus menerus dalam pelaksanaan kebijakan . Menurut Siregar, monitoring dan evaluasi diadakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan, dalam hal ini para implementor mampu merealisasikan target yang telah direncanakan semula dan bagaimana monitoring dan evaluasi itu sendiri mampu menjalankan fungsinya [5]. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan pelayanan Program Kampung KB pada umumnya telah memenuhi kriteria dan dapat dikatakan dapat dilakukan dengan baik karena monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kampung KB ini dilaksanakan secara rutin yakni setiap bulan dan triwulan. Pengawasan/monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memonitor dan mengevaluasi program, kebijakan yang dikembangkan dalam pelayanan saat itu, serta merumuskan, merekomendasikan kebijakan, dan memungkinkan peningkatan kinerja pemerintah kecamatan. Pengawasan/ monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara internal oleh BKKBN Provinsi Gorontalo dan DPPKBP3A Kota Gorontalo hanya sebatas pertanggung jawaban penggunaan dana DAK yang dialokasikan dalam dana BOKB pada Kampung KB.

3.4 Faktor-Faktor yang menentukan Implementasi Kebijakan Program Kampung KB dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

3.4.1 Mentalitas

Menurut Kadji, Dalam aspek implementasi dari sebuah kebijakan, maka yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana produk kebijakan itu dapat menyentuh dan merubah perilaku dari aparatur (pembuat dan implementor kebijakan) pihak praktisi bisnis, dan juga masyarakat sebagai subjek dan objek dari kebijakan itu sendiri [2]. Menurut Octaviani bahwa jika sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan rendah seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, dan sifat demokratis, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien [6]. Sedangkan Wahyuningsih, menjelaskan bahwa watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis sangat menentukan optimalisasi dan efektifitas implementasi kebijakan [7].

Pendekatan mentalitas yang merupakan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi Program Kampung KB dapat disimpulkan bahwa mentalitas aparatur pelaksana dan masyarakat perlu dan penting untuk dilakukan perbaikan. Berbicara masalah implementasi kebijakan Program Kampung KB maka tidak akan terlepas dengan proses pemberian pelayanan kepada masyarakat, untuk itu sikap implementor atau pelaksana kebijakan dalam memberikan pelayanan akan menjadi perhatian dalam pembahasan mentalitas aparatur, karena dampak yang diinginkan adalah pelayanan publik yang efektif, sehingga dalam pelaksanaan pelayanan aparatur harus memperlakukan masyarakat secara adil, dan masyarakat juga perlu menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi. Sesuai dengan hasil penelitian masih terdapat beberapa keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan KB yang dijalankan Kecamatan Kota Barat, keluhan ini menurut pernyataan informan masyarakat yang ditemui peneliti yaitu menyatakan bahwa mereka masih menunggu lama atau berjam-jam dalam menunggu pelayanan, selain itu untuk kepastian waktu pelayanan yang rutin dilaksanakan, hal inilah yang menjadikan masyarakat menunggu lama dalam ruang pelayanan. Untuk mengatasi masalah ini di butuhkan peran pimpinan untuk mengkoordinir kehadiran, kinerja para pegawainya dan memotivasi pegawainya agar lebih disiplin dalam melaksanakan tugasnya, karena dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik, peran dari pemimpin menjadi penentu, berhasil dan gagalnya suatu kebijakan mencapai dampak-dampak yang diinginkan terletak pada kualitas kepemimpinan yang dimiliki dari suatu organisasi yang disertai tugas memimpin dalam organisasi tersebut.

3.4.2 Sistem

Menurut Kadji Pendekatan sistem dipandang merupakan salah satu pendekatan logis dan analitis terhadap berbagai bidang termasuk bidang implementasi kebijakan publik [2]. Zulta

Suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan [8]. Maka dapat ditegaskan bahwa setiap kebijakan akan diimplementasikan pasti tidak luput dari pengaruh langsung dan tidak langsung dari sebuah sistem yang melingkupi kebijakan itu sendiri. Pendekatan sistem yang merupakan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan Kampung KB di Kecamatan Kota Barat hasilnya belum memenuhi kriteria. Hal ini dapat dilihat dari Ketersediaan sarana prasarana masih kurang dalam menunjang kegiatan program kampung KB, ketersediaan SDM juga masih kurang, sementara kedua hal ini begitu penting dalam menunjang pelaksanaan program kampung KB yang diterapkan dikecamatan sehingga perlunya perbaikan secara terus menerus dari DPPKBP3A Kota Gorontalo. Sesuai penelitian yang dilaksanakan kampung KB telah memiliki SOP tetapi belum berjalan sesuai SOP ada. Dalam pembuatan standar pelayanan sebaiknya DPPKBP3A perlu memperhatikan : 1) Standar pelayanan sebaiknya hanya mengatur hal-hal yang pokok menyangkut sistem pelayanan publik, dari sisi input dimana meliputi : a) Standar pembiayaan, b) sarana dan prasarana, c) kompetensi aparat dan kewenangannya. 2) Standar proses dimana mengatur prinsip dasar dalam mengelola pelayanan publik, standar proses ini tidak perlu dilakukan seideal mungkin sehingga mudah merespon dinamika yang berkembang dilingkungan. 3) Standar output, dalam hal ini standar perlu mendeskripsikan pelayanan yang akan diterima oleh pengguna layanan secara jelas dan baik, mencakup kualitas dan kuantitasnya.

3.4.3 Jejaring Kerja Sama

Menurut Kadji Tinjauan prespektif kerja sama sebagai pendekatan dalam implementasi kebijakan, terdapat pada 1) Kokohnya jejaring kerja sama dan sinergitas antar pemerintah pusat dan daerah, kerjasama pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, kerjasama yang saling bersinergi antara organisasi pemerintahan daerah, kerjasama antar pemerintah daerah, kerja sama antar pemerintah kecamatan / desa dan kelurahan dalam rangka mengeleminir egoisme lokal dan panitisme sectoral [2]. Kokohnya jejaring kerja sama dan sinergitas antar intern praktisi bisnis/ usahawan dalam mendukung stabilitas perekonomian publik. 3) Kokohnya jejaring kerja sama dan sinergitas antar individu dalam kelompok masyarakat dan antar masyarakat di dalam dan diluar komunitasnya atau antara masyarakat desa yang satu dengan sekitarnya. 4) Kokohnya jejaring kerja sama sinergitas antar pihak (pemerintah swasta, dan masyarakat) disemua bidang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pendekatan jejaring kerjasama yang merupakan faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan Program Kampung KB pada

umumnya belum memenuhi kriteria atau belum sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pelayanan yang ada di kampung KB kecamatan Kota barat selama ini telah menjangkit kerja sama antar instansi lintas sektor terkait sesuai yang dikatan oleh informan namun untuk kerja sama antar masyarakat masih belum sepenuhnya dilaksanakan,. Hanya awal-awal saja dilaksanakan program kerja sama dengan masyarakat namun sudah mulai tidak berjalan lagi. Sementara DPPKBP3A dapat mengembangkan pendekatan jejaring kerja sama dari level terendah dalam birokrasi maupun diluar birokrasi, seperti kerja sama diluar birokrasi Kantor kecamatan dapat melakukan kerja sama dengan para pelaku- pelaku usaha, dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan KB. Bentuk kerjasama yang dikembangkan dalam birokrasi mulai dari tingkat desa/ kelurahan, dan Instansi lintas sektor yang menjalankan program KB seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan bahwa:

1. Implementasi kebijakan Program Kampung KB di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo. Dalam pelaksanaan program kampung KB perencanaanya belum maksimal dilakukan, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal kecamatan. Secara umum pelaksanaan program KB telah memenuhi kriteria dan dapat dilakukan dengan baik karena monev telah di laksanakan secara rutin. Namun masih ada masyarakat yang belum paham terkait dengan pelaksanaan pelayanan program KB.
2. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan Program Kampung KB di Kecamatan Kota Barat. Dalam pelaksanaan program kampung KB pendekatan mentalitas aparatur telah dilaksanakan dengan baik namun pendekatan sistem terkait dengan ketersediaan sarana dan SDM belum cukup memadai sehingga kerja sama dalam pelaksanaan program KB belum sepenuhnya di laksanakan.

Referensi

- [1] “Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.” .
- [2] Y. Kadji, *Implementasi Kebijakan Dalam Perspektif Realitas*. Tulung Agung Jawa Timur: Cahaya Abadi, 2008.
- [3] J. Bryson, *Perencanaan Strategis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [4] A. Elwan, *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT.

Grasindo, 2005.

- [5] S. Siregar, *Metode Penelitian Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- [6] A. Octaviani, “Efektivitas Kebijakan Kampung Keluarga Berencana Terhadap Penerimaan Konsep Keluarga Berencana,” *Univ. Sebelah Maret*, 2016.
- [7] L. Wahyuningsih, “Kajian Karakteristik Kampung Keluarga Berencana,” *Univ. Negeri Surabaya*.
- [8] N. Zulta, “Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Upaya Penanggulang Kemiskinan,” *Univ. Lampung*, 2017.